

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
(LAKIP)
TAHUN 2022**



**KANTOR CAMAT TOMA
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2023**

ALAMAT: JLN. ARAH GENASI KM. 10 DESA HILISATARO RAYA KODE POS 22865
Email : kantorcamattoma.nisel@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan Berkat dan Rahmat-NYA semata, sehingga Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Toma Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

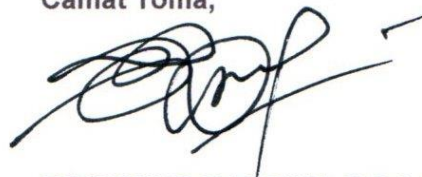
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan selama tahun anggaran 2022. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik, dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan serta bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan dimasa mendatang.

Demikian semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toma, Januari 2023

Camat Toma,



ROMIANUS MADUWU, S.Pd.,MM
NIP. 19770115 200801 1 022



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. PERENCANAAN KERJA	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
B. Realisasi Anggaran.....	35
BAB IV. PENUTUP.....	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. PK Perubahan Tahun 2022	
2. PK Tahun 2023	
3. IKU Tahun 2021-2026	
4. Rencana Aksi Perubahan Tahun 2022	
5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Renstra 2021-2026 /Tabel T-C.26)	
6. Tabel Renja Perubahan Tahun 2022	

BAB I

PENDAHULUAN

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

SAKIP Kantor Camat Toma Tahun 2022 disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 dan diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Toma serta Rencana Strategis Kantor Camat Toma Tahun 2021-2026.

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan salah satu asas umum Penyelenggaraan Negara adalah Asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Kantor Camat Toma selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan *pembenahan* kinerja. Pembentukan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kantor Camat Toma sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memegang peranan didalam sistem pemerintahan di Indonesia pada umumnya dan di Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan khususnya yaitu sebagai fasilitator serta sebagai dinamisator. Pemerintah bertindak mewakili seluruh kepentingan masyarakat, sehingga dalam menjalankan peranan tersebut Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Dalam perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban pemerintah sebagai pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam menjalankan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan yang relevan, konsisten, akurat, objektif dan wajar.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek manajerial, teknis dan keuangan.

Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan adanya sistem yang digunakan untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi Sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah ini diharapkan bisa merubah paradigma instansi pemerintah, yang semula hanya berorientasi uang menjadi orientasi pada hasil serta dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dimasa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program dan kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Dengan semangat menuju **“Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera”**, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut di atas, maka Instansi Pemerintah Kantor Camat Toma telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.

LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Toma kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 88 Tahun 2021.
- q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 89 Tahun 2021.
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2021;
- t. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi SKPD di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan;
- u. Rencana Strategis Kecamatan Toma Tahun 2021-2026.

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Kantor Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah atau instansi lainnya.

Agar dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan bidang pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam uraian tugas dan fungsi Kecamatan Toma, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang dan dapat mengatasi ancaman yang mungkin terjadi. Dengan demikian Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.

Adapun Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kantor Camat Toma Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan selama Tahun Anggaran 2022.
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan dimasa yang akan datang.
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di Lingkungan Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan dari perspektif geografis merupakan bagian dari pusat pemerintahan kecamatan yang berada di wilayah pesisir pantai Kabupaten Nias Selatan yang memiliki luas wilayah sekitar 41,26 km², dengan jumlah penduduk 14.167 jiwa (Laki-laki = 6.828 orang dan Perempuan = 7.328), terdiri dari 14 desa.

Data Desa di Kecamatan Toma :

1. Hiliamaetaluo
2. Desa Hilisataro
3. Desa Hilisataro Nandisa
4. Desa Hilisataro Ehosofayo
5. Desa Hilisataro Gewa
6. Desa Hilisataro Raya
7. Desa Hiliasi
8. Desa Hilinamoniha
9. Desa Bawoganowo
10. Desa Hilimagari
11. Desa Hilialawa
12. Desa Hilisoromi
13. Desa Hilindraso Raya
14. Desa Hilindraso Niha

Paradigma Pemerintah Daerah yang mengacu kepada undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , yang telah merubah peran Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang di masalah terbatas tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat yang diatur dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan, dimana kecamatan sebagai perangkat daerah berperan sebagai penyelenggara pemerintah, bagaimana pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.

Dengan dilaksanakannya pelimpahan sebagian kewenangan kepada kecamatan, maka diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan lebih efisien serta didukung adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan. Dimasa depan Tugas Pemerintah Kabupaten lebih difokuskan kepada persoalan yang strategis yang bersifat makro.Sedangkan persoalan teknis kewilayahan, termasuk didalamnya penyelesaian persoalan-persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan oleh para Camat.

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat mengindikasikan adanya otoritas dan kapasitas Camat untuk :

1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dilimpahkan;
3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya;
4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.

Secara substantif, kewenangan yang dilimpahkan meliputi kewenangan yang bersifat internal, yakni kewenangan Camat untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintah secara utuh, termasuk didalamnya kewenangan yang menyangkut masalah-masalah kepegawaian, barang daerah dan juga pengelolaan keuangan (APBD) serta kewenangan yang bersifat eksternal, yakni kewenangan yang menyangkut pelaksanaan tugas pembinaan dan koordinasi kemasyarakatan secara utuh, antara lain tugas untuk mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, sekaligus dapat melakukan tindakan nyata sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

C. Tugas dan Fungsi (DUK Kepegawaian & Struktur Organisasi)

Tugas Pokok dan fungsi Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Nias Selatan. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, sebagai penyelenggara pemerintahan kecamatan dan koordinator penyelenggaraan program pembangunan di wilayah kerjanya, yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

C.1 Tugas Pokok Kantor Camat Toma

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Atau dengan kata lain membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah atau instansinya.

C.2 Fungsi Kantor Kantor Camat Toma

Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kantor Camat Toma mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan di wilayah kecamatan.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yaitu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum.
- J Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

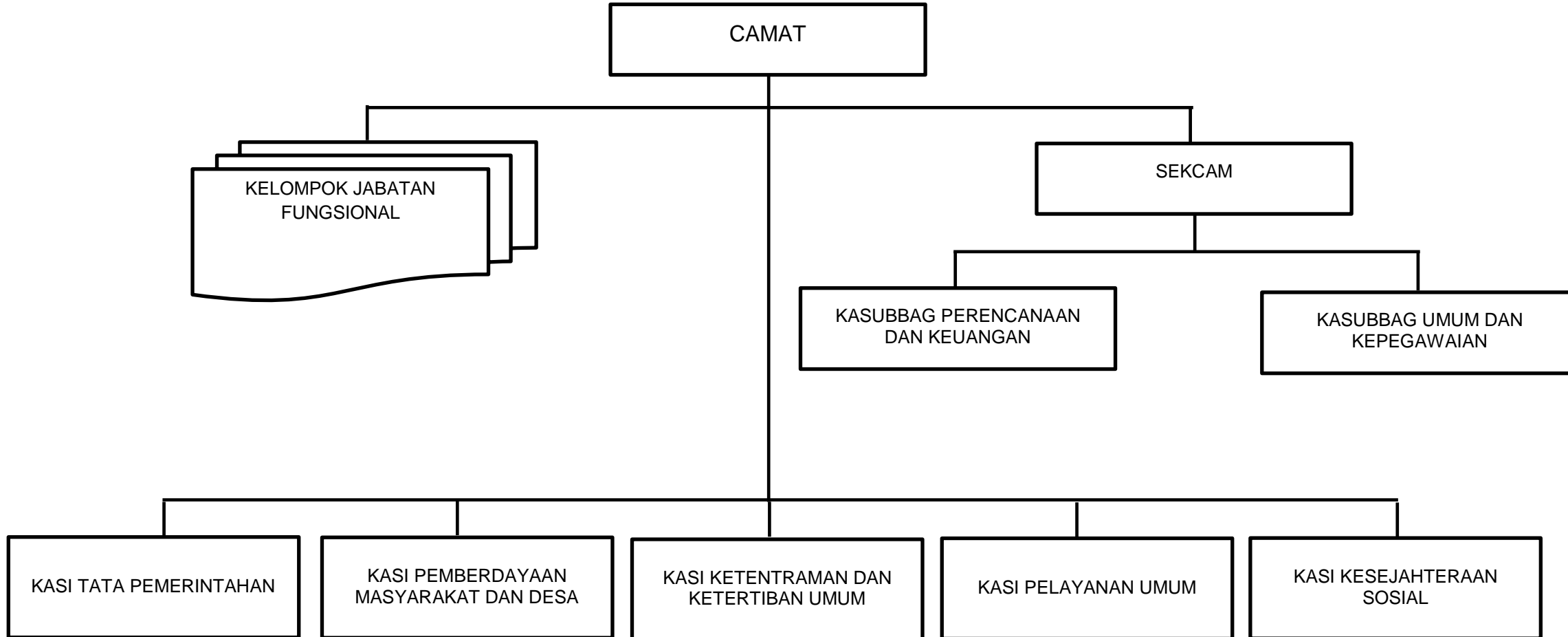
Dengan demikian dengan tugas “mengkoordinasikan” pemerintah kecamatan diharapkan mampu mendorong kelancaran berbagai kegiatan di tingkat kecamatan kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan dengan tugas “membina” diharapkan memfasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata pemerintahan desa yang baik.

Terkait dengan hal tersebut perlu disusun Rencana Strategis yang menjabarkan antara lain Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Kegiatan setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat maupun Pihak Pemerintah Kabupaten.

C.2.1 Struktur Organisasi

Dengan terjadinya perubahan nomenklatur daerah mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan yang semula berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan nomor 1 Tahun 2015 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan dengan susunan organisasi yang baru yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 01.5_63 Tahun 2016 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Nias Selatan. Struktur Organisasi Kantor Camat Toma dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT TOMA KABUPATEN NIAS SELATAN





PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

KECAMATAN TOMA

Alamat: Jl. Arah Genasi Km. 10 Desa Hilisataro Raya Kode Pos 22865

Email : kantorcamattoma.nisel@gmail.com

NO	NAMA	NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT		JABATAN		ESELON	PELATIHAN		PENDIDIKAN AKHIR		TAHUN & BULAN KGB		Ket
				GOL/RUANG	TMT	NAMA	TMT		NAMA	TAHUN	NAMA/JURUSAN	TAMAT TAHUN	TAHUN LAMA KGB	KGB BERIKUTNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ROMIANUS MADUWU, S. Pd., MM	19770115 200801 1 022	LAKI-LAKI	Penata Tk. I III/d	01/04/2021	CAMAT	12/10/2022	III.a	Diklat Prajab	2010	Manajemen Pendidikan	2016	2021	01/08/2023	
2	SAMUELI LAOLI, S. Pd	19850810 200804 1 001	LAKI-LAKI	Penata Tk. I III/d	01/10/2015	KASI PELUM	03/11/2017	IV.a	Diklat Prajab	2010	Bahasa Inggris	2007	2022	2024	
3	APRIL SARUMAHA, S. Pd	19760401 200804 1 001	LAKI-LAKI	Penata, III/c	01/04/2021	SEKCAM	27/12/2021	IV.a	Diklat Prajab	2010	S-1 PGSD	2013	2022	01/04/2024	
4	RAHMAT ELI TELAUMBANUA, A. Md	19780922 200502 1 001	LAKI-LAKI	Penata, III/c	01/04/2021	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	12/02/2019	IV.b	Diklat Prajab	2006	D-III /Nautika	2002	01/02/2021	01/02/2023	
5	PERSATUAN TELAUMBANUA, SE	19710907 200611 1001	LAKI-LAKI	Penata Muda Tk. I, III/b	01/04/2020	KASI TAPEM	05/04/2022	IV.a	Diklat Prajab	2008	S-1 /MANAJEMEN	2015	2021	01/11/2023	
6	SUDMO SARUMAHA, S. Pd	19820307 201410 1 001	LAKI-LAKI	Penata Muda Tk. I, III/b	01/10/2021	KASI PMD/K	05/01/2022	IV.a	Diklat Prajab	2015	MATEMATIKA	2007	2022	2024	
7	SEDERHANA DUHA, SE	19860608 201410 1 001	LAKI-LAKI	Penata Muda Tk. I, III/b	01/10/2021	KASI KESSOS	05/01/2022	IV.a	Diklat Prajab	2015	S-1 /MANAJEMEN	2011	01/01/2022	01/01/2024	
8	PERMINTAAN TALUNOHI, S. Pd	19780817 201410 1 004	LAKI-LAKI	Penata Muda Tk. I, III/b	01/04/2021	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	05/04/2022	IV.b	Diklat Prajab	2015	S-1 /PGSD	2013	2021	01/01/2023	
9	MISERICORDIAS LATURE, A. Md. Keb	19850723 201001 2 016	PEREMPUAN	Penata Muda Tk. I, III/b	01/04/2018	KEPALA DESA HILISATARO EHO SOFAYO	-	-	Diklat Prajab	2010	D-III KEBIDANAN	2014	2017	-	

10	IRWANI HARITA, A.Md	19841112 201001 2 031	PEREMPUAN	Pengatur Tk. I II/d	01/10/2018	Plt. KASI TRANTIB	-	-	Diklat Prajab	2011	D-II PGSD	2007	2022	01/01/2024	
11	SWASTIKA FAU, A. Md. Keb	19890924 201704 2 004	PEREMPUAN	Pengatur Tk. I II/d	01/04/2022	Penata Laporan Keuangan	-	-	Diklat Prajab	2018	D-III KEBIDANAN	2011	2022	01/06/2024	
12	VITUS DUHA	19770317 201001 1 011	LAKI-LAKI	Pengatur / IIc	01/10/2018	Pengadimistrasian Kepegawaian	-	-	-	-	SMA-PAKET C /IPS	2008	2021	01/01/2023	
13	GAYABARU ZEBUA	19671212 200701 1 038	LAKI-LAKI	Pengatur / IIc	01/04/2019	Pengelola Bantuan Sosial	-	-	-	-	SMA-PAKET C	2009	2021	01/01/2023	
14	ZAMAIGI LOI	19700102 200701 1 034	LAKI-LAKI	Pengatur / IIc	01/04/2019	Pengadimistrasian Umum	-	-	-	-	SMA-PAKET C /IPS	2008	2021	01/01/2023	
15	YASOZATULO TELAUMBANUA	19770131 200906 1 001	LAKI-LAKI	Pengatur / IIc	01/10/2019	Pengelola Ketertiban dan Keamanan	-	-	-	-	SMA-PAKET C	2008	2021	01/07/2023	
16	ANUAR TELAUMBANUA	19760801 201410 1 002	LAKI-LAKI	Pengatur Muda Tk. I/ II d	01/10/2018	Pengadministrasi Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	SMA/IPS	1994	2022	01/01/2024	
17	SUANDI TELAUMBANUA	19761010 201410 1 002	LAKI-LAKI	Pengatur Tk. I/IIb	01/04/2020	Pengadministrasi Laporan Keuangan	-	-	Diklat Prajab	2016	STM MESIN	1994	2021	01/09/2023	

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Camat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Tenaga fungsional senior diangkat dan ditetapkan oleh Camat dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Tabel 1.5

Data Pegawai Kantor Camat Toma berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Eselon III.a	1	-	1
2	Eselon III.b	1	-	1
3	Eselon IV.a	4	-	4
4	Eselon IV.b	2	-	2
5	Staf	6	3	9
6	Kepala Desa	-	-	-
6	Sekretaris Desa	-	-	-
	Total	14	3	17

Tabel 1.6

Data Pegawai Kantor Kecamatan Toma Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Golongan IV	-	-	-
2	Golongan III	8	-	7
3	Golongan II	6	3	9
4	Golongan I	-	-	-
	Total	13	3	17

Tabel 1.7

Data Pegawai Kantor Kecamatan Toma Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	SMA/Sederajat	6	2	8
2	D-I	-	-	-
3	D-II	-	1	1
4	D-III	1	-	1
5	D-IV	-	-	-
6	S-1	6	-	6
7	S-2	1	-	1
	Total	14	3	14

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan, dimana hal tersebut dapat diuraikan dengan pendekatan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strength/S) :

1. Sebagian besar Aparatur Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan adalah penduduk setempat.
2. Komitmen kuat Aparatur Pemerintah Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan untuk meningkatkan/mengembangkan kemampuan dan pengetahuan.
3. Tersedianya dokumen Rencana Strategis, rencana kerja Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan.
4. Tersedianya Anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan.

Kelemahan (Weaknes/W) :

1. Kualitas sumber daya Aparatur perangkat desa yang masih lemah.
2. Belum tersusunnya atau menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.
3. Belum memadainya Sarana dan Prasarana Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan.

Peluang (Oppurtunity/O) :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat.
2. Misi pertama kepala daerah periode 2016-2021 adalah membangun kultur pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
3. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan.
4. Tersedianya DD/ADD pada program percepatan pembangunan pedesaan di wilayah kecamatan.
5. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan.
6. Masuknya aliran listrik merupakan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha.

Tantangan (Threats/T) :

1. Kondisi geografis Kecamatan Toma yang rawan akan bencana alam, misalnya tanah longsor dan tsunami.
2. Kurangnya swadaya masyarakat dalam menyukseskan program Dana Desa.
3. Kondisi Keuangan Daerah yang belum bisa memberikan mempengaruhi besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan di Kecamatan Toma, sehingga mempengaruhi sebagian besar program dan kegiatan di kantor camat toma tidak dilaksanakan akibat penghapusan program dan kegiatan.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk hukum dan dokumen kependudukan.
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pendataan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Minimnya kesadaran wajib pajak dalam melunasi PBB.
7. Masih rendahnya partisipasi masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan.
8. Adanya peredaran narkoba di wilayah kecamatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dan oknum masyarakat setempat sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban.

PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi Daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik.

Pemecahan masalah melalui strategi Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Identifikasi rumusan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah didasarkan pada hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja tahun tahun sebelumnya dan terakhir ini, dan kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan sebagai berikut:

No.	Masalah Pokok		Masalah		Akar Masalah
1	Masih belum optimalnya kinerja pemerintahan di Kecamatan	1	Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal	-	Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur
				-	Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
				-	Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk
				-	Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang limpahkan/diberikan
2.	Penyusunan kebijakan belum dilakukan secara komprehensif dan berbasis data/bukti yang handal.	1	Manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung berbagai alternatif kebijakan yang inovatif.	1	Kebutuhan penyediaan dan tuntutan kualitas telaah berbagai alternatif kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks dan berkembang secara dinamis
		2	Manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung oleh agenda penataan peraturan perundangdanga	2	Sinergi penataan peraturan perundangundangan guna mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
3.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah belum optimal mendorong terwujudnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemeritahan daerah	1	Manajemen pengelolaan kebijakan strategis belum optimal sehingga perlu upaya peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan Daerah	1	Belum optimalnya manajemen pelaksanaan program/kegiatan strategis sehingga pencapaiannya cenderung belum efektif dan akuntabel
		2	Manajemen secara integratif pelaksanaan tugas perangkat daerah belum optimal sehingga pelaksanaan tugas perangkat daerah belum efektif dan akuntabel.	2	Belum optimalnya manajemen pengendalian pencapaian kinerja perangkat daerah
		3	Administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal mendorong efektifitas koordinasi berbagai lingkup pemerintahan daerah.	3	Koordinasi antar lingkup pemerintahan daerah belum optimal memfasilitasi kebutuhan bersama berbagai pihak
		4	Pelaksanaan otonomi daerah belum optimal mendorong efektifitas kerja sama berbagai lingkup pemerintahan daerah	4	Pelaksanaan otonomi daerah belum optimal mendorong inovasi penyelenggaraan pemerintahan secara relatif merata pada berbagai lingkup pemerintahan daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

➤ **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia, penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan. Saat ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga Indikator Kinerja Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun system manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

▪ **Maksud dan Tujuan Pembuatan IKU**

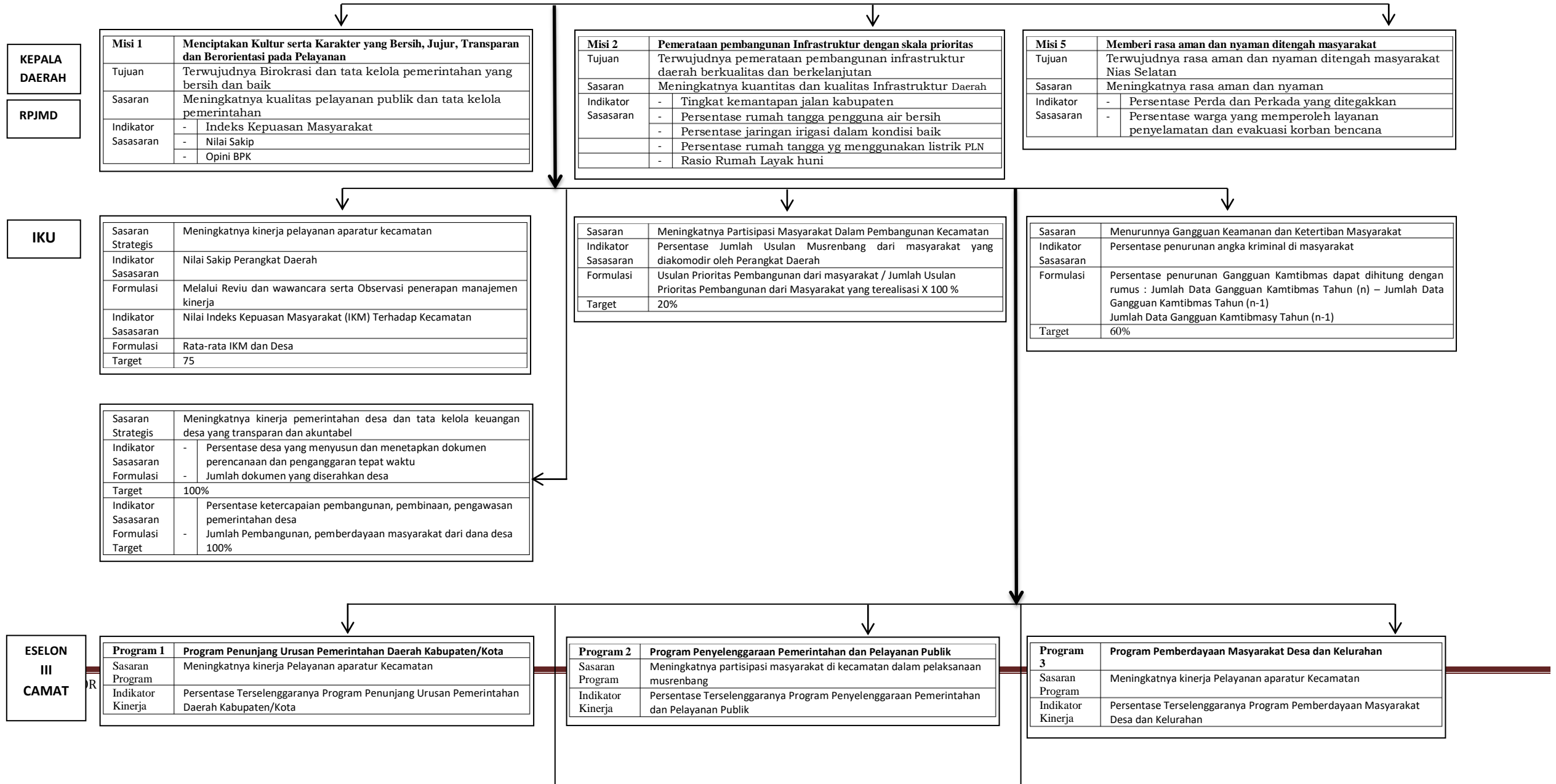
Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Pemerintah Kecamatan Toma khususnya maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan IKU Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan:

- Untuk memperoleh kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- **Syarat dan kriteria penyusunan IKU adalah :**
 - Spesifik; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
 - Measurable; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
 - Achievable; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
 - Relevant; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.
 - Time Lines.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR CAMAT TOMA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2023**

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
1.	Nilai Lakip	Baik	Baik	Baik
2.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Dok	1 Dok	1 Dok
3.	Persentase pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu	80%	86, %	87%
4.	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi, laporan pertanggungjawaban desa tepat waktu dan berkualitas	75%	76%	80%

CASCADING KANTOR CAMAT TOMA TAHUN 2023



Program 4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sasaran Program	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat kecamatan
Indikator Kinerja	Persentase Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program 5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sasaran Program	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel
Indikator Kinerja	Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**ESELON III
SEKRETARIS**

Program 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran kgt	Meningkatnya kinerja Pelayanan aparatur Kecamatan
Kegiatan 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja 1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah
Kegiatan 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja 2	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan 3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Kinerja 3	Persentase Terlaksananya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan 4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja 4	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan 5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja 5	Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan 6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja 6	Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Program 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Sasaran kgt	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pelaksanaan musrenbang
Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Indikator Kinerja	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Program 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Sasaran kgt	Meningkatnya kinerja Pelayanan aparatur Kecamatan
Kegiatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Indikator Kinerja	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Program 4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sasaran kgt	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat kecamatan
Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah
Indikator Kinerja	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah

Program 5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sasaran kgt	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel
Kegiatan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator Kinerja	Persentase pembinaan, pengawasan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

ESELON IV

LAKIP KANTOR

KASI TAPEM	
Program 2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sasaran kgt	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pelaksanaan musrenbang
Sub Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Indikator Kinerja	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

KASI PMD	
Program 5	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sasaran kgt	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel
Sub Kgt 1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Indikator Kinerja 1	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan 2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Indikator Kinerja 2	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

KASI TRANTIB	
Program 5	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sasaran kgt	Menurunnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Sub Kegiatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikator Kinerja	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

KASI PELUM	
Program 3	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sasaran kgt	Meningkatnya kinerja Pelayanan aparatur Kecamatan
Sub Kegiatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Kinerja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Sub Kegiatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan
Indikator Kinerja	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

KASI KESOS	
Program 4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah
Sasaran kgt	Meningkatnya kinerja Pelayanan aparatur Kecamatan
Sub Kegiatan	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
Indikator Kinerja	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila

ESELON
IV

KASUBBAG PERENCANAAN & KEUANGAN	
Program 1	
Kegiatan 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran kgt	Meningkatnya kinerja Pelayanan aparatur Kecamatan
Sub Kegiatan 1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja 1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan 1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Indikator Kinerja 1.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD
Sub Kegiatan 1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Indikator Kinerja 1.3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
Sub Kegiatan 1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Indikator Kinerja 1.4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD
Sub Kegiatan 1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Indikator Kinerja 1.5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
Sub Kegiatan 1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja 1.6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sub Kegiatan 1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja 1.7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan 2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Kinerja 2.1	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan
Sub Kegiatan 2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator Kinerja 2.2	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sub Kegiatan 2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Indikator Kinerja 2.3	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	
Program 1	
Kegiatan 3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sasaran kgt	Meningkatnya kinerja Pelayanan aparatur Kecamatan
Sub Kegiatan 3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Indikator Kinerja 3.1	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Kegiatan 4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan 4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Kinerja 4.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Sub Kegiatan 4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Kinerja 4.2	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Sub Kegiatan 4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator Kinerja 4.3	Jumlah ketersediaan jasa cetak dan penggandaan
Sub Kegiatan 4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Kinerja 4.4	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah
Kegiatan 6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan 6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Kinerja 6.1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Kegiatan 7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan 7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Kinerja 7.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan 7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan 7.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Kinerja 7.1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

JF

KASI TRANTIB

PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	
Sub Kegiatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Sub kgt	Menurunnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Indikator Kinerja 1	Jumlah Pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koodinasi dan penyusunan laporan di bidang data keamanan dan ketertiban
Indikator Kinerja 2	Jumlah informasi dan kegiatan prefentif kepada masyarakat tentang kegiatan bidang kelinmasan

KASI PELUM

PENGADIMISTRASIAN KEPENDUDUKAN	
Sub Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikat Terkait
Sasaran Sub kgt	Meningkatnya kinerja Pelayanan aparatur Kecamatan
Indikator Kinerja 1	Jumlah penduduk desa berdasarkan status, jenis kelamin dan pekerjaan
Indikator Kinerja 2	Jumlah kepengurusan dokumen kependudukan meliputi, KK, KTP, Akta Lahir, Kawin dan Kematian
Indikator Kinerja 3	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat

KASI KESOS

PENGELOLA REHABILITASI MASALAH SOSIAL	
Sub Kegiatan	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
Sasaran Sub kgt	Meningkatnya kinerja Pelayanan aparatur Kecamatan
Indikator Kinerja 1	Jumlah data keluarga penerima manfaat PKH sekecamatan
Indikator Kinerja 2	Jumlah data masyarakat desa penyandang disabilitas

KASUBBAG PERENCANAAN & KEUANGAN

PENATA LAPORAN KEUANGAN	
Sub Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sasaran Sub kgt	Meningkatnya kinerja Pelayanan aparatur Kecamatan
Indikator Kinerja 1	Jumlah bahan penyusunan anggaran OPD sesuai program dan kegiatan kantor tahun berjalan
Indikator Kinerja 2	Jumlah pencatat/pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran dalam rangka tertib administrasi

KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

PENGADIMISTRASI UMUM	
Sub Kegiatan	Administrasi Umum, Kepegawaian Perangkat Daerah dan pemeliharaan/ jasa penunjang urusan pemda
Sasaran Sub kgt	Meningkatnya kinerja Pelayanan aparatur Kecamatan
Indikator Kinerja 1	Jumlah surat masuk maupun keluar dengan cara mencocokkan tujuan dan asal surat agar terhindar dari kesalahan
Indikator Kinerja 2	Jumlah surat masuk maupun keluar yang tercatat pada buku daftar pengendalian berdasarkan nomor, tanggal, masalah surat sebagai bukti surat telah diterima

PENGADIMISTRASI UMUM	
Sub Kegiatan	Administrasi Umum, Kepegawaian Perangkat Daerah dan pemeliharaan/ jasa penunjang urusan pemda
Sasaran Sub kgt	Meningkatnya kinerja Pelayanan aparatur Kecamatan
Indikator Kinerja 1	Jumlah surat masuk maupun keluar dengan cara mencocokkan tujuan dan asal surat agar terhindar dari kesalahan
Indikator Kinerja 2	Jumlah surat masuk maupun keluar yang tercatat pada buku daftar pengendalian berdasarkan nomor, tanggal, masalah surat sebagai bukti surat telah diterima

PENGADIMISTRASI UMUM	
Sub Kegiatan	Administrasi Umum, Kepegawaian Perangkat Daerah dan pemeliharaan/ jasa penunjang urusan pemda
Sasaran Sub kgt	Meningkatnya kinerja Pelayanan aparatur Kecamatan
Indikator Kinerja 1	Jumlah surat masuk maupun keluar dengan cara mencocokkan tujuan dan asal surat agar terhindar dari kesalahan
Indikator Kinerja 2	Jumlah surat masuk maupun keluar yang tercatat pada buku daftar pengendalian berdasarkan nomor, tanggal, masalah surat sebagai bukti surat telah diterima

➤ **RENCANA AKSI TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA								
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	Menyusun, menyiapkan dokumen renja dan perubahan renja	749.300	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	TW I	55%	
										TW II	0%	
										TW III	0%	
										TW IV	45%	
			100%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dok	Menyusun, menyiapkan dokumen RKA	999.8000		TW I	0%	
										TW II	0%	
										TW III	100%	
										TW IV	0%	
			100%	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dok	Menyusun, menyiapkan dokumen Perubahan RKA	999.300		TW I	0%	
										TW II	0%	
										TW III	100%	
										TW IV	0%	
100%	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dok	Menyusun, menyiapkan dokumen DPA	1.003.100		TW I	0%				
							TW II	0%				
							TW III	0%				
							TW IV	100%				
100%	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dok	Menyusun, menyiapkan dokumen Perubahan DPA	987.000		TW I	0%				
							TW II	0%				
							TW III	100%				
							TW IV	0%				
100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dok	Menyusun, menyiapkan dokumen lakip, LPPD	749.900		TW I	100%				
							TW II	0%				
							TW III	0%				
							TW IV	0%				

		100%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	Menyusun, menyiapkan dokumen Evaluasi renja tri wulan	748.600		TW I	0%	
									TW II	56%	
									TW III	44%	
									TW IV	0%	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (tunjangan pengelolaan keuangan)	4 Org	Pembayaran tunjangan ASN pengelola keuangan	47.160.070	Bendahara Pengeluaran	TW I	25%	
									TW II	25%	
									TW III	25%	
									TW IV	25%	
		100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	Menyusun, menyiapkan dokumen laporan keuangan (penyusunan LRA, LPE, LO, neraca, SPJ fungsional, CaLK) dan Laporan BMD	1.500.000		TW I	0%	
									TW II	0%	
									TW III	0%	
									TW IV	100%	
		100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Lap	Menyusun, menyiapkan dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.499.200		TW I	28%	
									TW II	27%	
									TW III	27%	
									TW IV	18%	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket/ Stel	Pengadaan pakaian dinas PNS dan Pakaian Olahraga	25.968.006	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	TW I	0%	
									TW II	100%	
									TW III	0%	
									TW IV	0%	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan alat-alat dan komponen listrik	1.416.100	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	TW I	0%	
									TW II	56%	
									TW III	0%	
									TW IV	44%	
		100%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Penyediaan ATK, makanan & minuman rapat, alat kebersihan kantor, pembayaran tagihan listrik dan biaya internet	75.871.460		TW I	29%	
									TW II	24%	
									TW III	24%	
									TW IV	23%	

			100%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Penyediaan bahan cetak kebutuhan kantor, penggandaan berkas dokumen kantor	11.440.400		TW I	33%	
			100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294 Lap	Melaksanakan perjalanan dinas ke kabupaten dan desa sehubungan dengan kegiatan kantor	93.898.000		TW II	30%	
										TW III	20%	
										TW IV	17%	
										TW I	33%	
										TW II	32%	
										TW III	27%	
										TW IV	19%	
		Persentase terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Pengadaan AC, Laptop dan Scanner untuk menunjang pekerjaan PNS	29.852.007	Kasubbag Umum & Kepegawaian	TW I	100%	
										TW II	0%	
										TW III	0%	
										TW IV	0%	
		Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	Penyediaan materai dan benda pos lainnya untuk keperluan administrasi	750.000	Kasubbag Umum & Kepegawaian	TW I	26%	
										TW II	27%	
										TW III	27%	
										TW IV	20%	
		Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Pemeliharaan peralatan kantor	2.840.000	Kasubbag Umum & Kepegawaian	TW I	51%	
										TW II	0%	
										TW III	49%	
										TW IV	0%	
2.	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
			100%	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap	Pelaksanaan kegiatan PKK	2.763.000	Kasi Pelayanan Umum	TW I	50%	
										TW II	0%	
										TW III	50%	
										TW IV	0%	

		Persentase Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
			100%	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	14 Lap	Pelaksanaan kegiatan budaya masyarakat dan lomba dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat	15.001.178	Kasi Pelayanan Umum	TW I	0%		
										TW II	100%		
										TW III	0%		
										TW IV	0%		
		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah									
			100%	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	2 Lbg Msyrakat	Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka HUT KEMRI dan Pelaksanaan upacara bendera HUT KEMRI	46.012.740	Kasi Kesejahteraan Sosial	TW I	0%		
								TW II	0%				
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			100%	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Lap	Pelaksanaan Musrenbang tingkat desa dan Kecamatan	7.228.800	Kasi Tata Pemerintahan	TW I	100%		
										TW II	0%		
4.	Meningkatnya kinerja pemerintah desa	Persentase pembinaan, pengawasan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
			100%	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	42 Dok	Mengawasi perencanaan RKPDes, APBDes, pendampingan manajemen pemdes bagi perangkat desa dan BPD	2.590.839	Kasi PMD	TW I	54%		
										TW II	0%		
										TW III	46%		
										TW IV	0%		
100%	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	98 Dok	Pembekalan pengelolaan keuangan desa, monitoring/evaluasi dana desa	25.200.000	TW I	34%						
						TW II	33%						
							TW III	0%					
							TW IV	33%					

			100%	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dok	Pelaksanaan forum komunikasi tingkat kecamatan dan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan/desa	2.771.200	Kasi Trantib	TW I	54%	
										TW II	0%	
										TW III	46%	
										TW IV	0%	



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

KECAMATAN TOMA

Alamat: Jln. Arah Genasi Km. 10 Desa Hilisataro Raya Kode Pos 22865
Email : kantorcamattoma.nisel@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ROMIANUS MADUWU, S. Pd., MM**

Jabatan : CAMAT TOMA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH**

Jabatan : Bupati Nias Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH

ROMIANUS MADUWU, S. Pd., MM
NIP. 19770115 200801 1 022

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR CAMAT TOMA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja aparatur	- Nilai Lakip	Baik
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Dok
3.	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat kecamatan	- Persentase pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu	85 %
4.	Meningkatnya kinerja pemerintah desa	- Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi, laporan pertanggungjawaban desa tepat waktu dan berkualitas	80%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 298.432.243	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 7.228.800	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 17.764.178	
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 46.012.740	
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 30.562.039	
Jumlah		Rp 400.000.000	

Teluk Dalam, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH

ROMIANUS MADUWU, S. Pd., MM
NIP. 19770115 200801 1 022



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

KECAMATAN TOMA

Alamat: Jln. Arah Genasi Km. 10 Desa Hilisataro Raya Kode Pos 22865
Email : kantorcamattoma.nisel@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ROMIANUS MADUWU, S. Pd., MM**

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/IIId

NIP. : 19770115 200801 1 022

Jabatan : CAMAT TOMA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH**

Jabatan : Bupati Nias Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH

ROMIANUS MADUWU, S. Pd., MM

Penata Tingkat I

NIP. 19770115 200801 1 022

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KANTOR CAMAT TOMA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja aparatur	- Nilai Lakip	Baik
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Dok
3.	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat kecamatan	- Persentase pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu	85 %
4.	Meningkatnya kinerja pemerintah desa	- Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi, laporan pertanggungjawaban desa tepat waktu dan berkualitas	75%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 217.215.250	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 5.55.000	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 1.380.150	
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 33.106.500	
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 26.309.700	
Jumlah		Rp 283.561.600	

Teluk Dalam, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH

ROMIANUS MADUWU, S. Pd., MM
Penata Tingkat I
NIP. 19770115 200801 1 022

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi/Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan.

1. Capaian Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Realisasi Kinerja dapat dilihat pada table di bawah ini :

Relisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Meningkatnya kinerja aparatur	- Nilai Lakip	Baik	-	Hingga Penyusunan Lakip Tahun 2022 Belum adanya Hasil Reviu/ Penilaian kinerja dari Inspektorat
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Dok	1 Dok	
3.	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat kecamatan	- Persentase pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu	85 %	80 %	
4.	Meningkatnya kinerja pemerintah desa	- Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi, laporan pertanggungjawaban desa tepat waktu dan berkualitas	75%	70%	

ANALISIS :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Aparatur

Hingga Penyusunan Lakip Tahun 2022 diselesaikan Belum adanya Hasil Reviu/ Penilaian kinerja dari Inspektorat

Indikator : Nilai Lakip

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan :

1. Tertib administrasi kepegawaian dan keuangan.
2. Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan.
3. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti.
4. Indeks kepuasan masyarakat.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan

Indikator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan:

1. Jumlah Persentase Partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang.

Dalam kegiatan ini dapat dilihat dengan nyata bahwa masyarakat desa kurang berpartisipasi/kurang peduli pada saat musrenbang ini dilaksanakan baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan karna setiap usulan musrenbang dari desa yang disampaikan melalui kecamatan kurang terealisasi di tingkat kabupaten. Dari 1 dokumen usulan kecamatan hanya kira-kira ± 15% yang dapat dapat terakomodir di tingkat kabupaten. Jadi artinya masyarakat menganggap musrenbang hanya kegiatan formalitas yang tidak membawa pengaruh/perubahan pada warga desa.

2. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan gotong royong dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Dari hasil pembuktian di lapangan bahwa sekarang ini sifat gotong royong sudah sangat minim bahkan sudah terkikis di hati masyarakat.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat kecamatan

Indikator : 1. Persentase pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu.

Dalam pelayanan kepada masyarakat kantor camat toma sudah berusaha semaksimal mungkin agar penyelesaian urusan dan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dan tepat selama persyaratan dan ketentuan dalam pelayan sudah dipenuhi oleh masyarakat kecuali jika ada hal-hal yang harus diselesaikan secara bertahap. Supaya masyarakat dapat mengetahui informasi tersebut pihak kecamatan sudah menyampaikan kepada masyarakat baik secara lisan maupun tulisan, bertatap muka maupun secara media sosial/WA Grup. Tingkat pelayanan kepada masyarakat sebesar 80%.

4. Sasaran 4 : Meningkatnya kinerja pemerintah desa.

Indikator : 1. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi, laporan pertanggungjawaban desa tepat waktu dan berkualitas .

Di Tahun 2022 ini dari 14 desa yang ada di kecamatan toma hanya 10 desa yang dapat menyerahkan dokumen administrasi, laporan pertanggungjawaban desa tepat waktu dari tenggat waktu yang telah ditetapkan. Ini disebabkan karena ada sebagian desa belum mandiri (meminta bantuan pihak lain) sehingga lambat dalam menyusun dan menyelesaikan dokumen yang diminta oleh pihak kecamatan maupun dari kabupaten. Ini dilatar belakangi kurangnya SDM Perangkat Desa yang diangkat oleh kepala desa.

2. Capaian kinerja berdasarkan Tahun Lalu

Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021(%)	Tahun terakhir			Target Renstra di tahun 2023	SPM/ Standar Nasional	Keterangan	
							Tahun 2022						
							Target	Realisasi	Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja aparatur	- Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	8	8	100	2	2	100	8	-	-	
		- Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	-	-	
		- Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	-	-	
		- Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	100	99,46	99,46	100	-	-	
		- Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	-	-	
		- Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase	100	100	100	100	0	0	100	-	-	
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	- Persentase Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	-	-	
		- Persentase Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	-	-	
		- Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah											
3	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat kecamatan	- Persentase Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase	100	13,3	13,3	100	97,21	97,21	100	-	-	
4	Meningkatnya kinerja pemerintah desa	Persentase pembinaan, pengawasan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa											

3. Capaian Kinerja sampai dengan tahun ini berdasarkan renstra

Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan target tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Persentase
1.	Meningkatnya kinerja aparatur	- Nilai Lakip	-	Baik	-
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Dok	1 Dok	100
3.	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat kecamatan	- Persentase pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu	80 %	85 %	106
4.	Meningkatnya kinerja pemerintah desa	- Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi, laporan pertanggungjawaban desa tepat waktu dan berkualitas	70%	75%	107

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
Nilai Sakip Perangkat Daerah	Baik	-	Belum adanya Reviu dan wawancara serta Observasi penerapan manajemen kinerja
Persentase Jumlah Usulan Musrenbang dari masyarakat yang diakomodir oleh Perangkat Daerah	20%	10%	Usulan rencana pembangunan dari masyarakat tidak tertera dalam kamus usulan pembangunan dari pemerintah
Persentase desa yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100	80	Terbatasnya sumber daya manusia yang bisa melaksanakan pekerjaannya yang sesuai dengan tupoksinya
Persentase ketercapaian pembangunan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	100	70	Terbatasnya sumber daya manusia yang bisa melaksanakan pekerjaannya yang sesuai dengan tupoksinya
Persentase penurunan angka kriminal di masyarakat	60	30%	Kurangnya perhatian aparat penegak hukum dalam memberantas pelaku kriminal dari kejahatan

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di organisasi dalam pencapaian kinerja.

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Jadi pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena keduanya-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*).

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	100	100	0
2.	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu	100	100	0

6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan/indikator kinerja.

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %
1.	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaporan dan Penyediaan/Pelaksanaan Operasional Kantor	100	100
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	100

B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan, DPPA Kantor Camat Toma sebesar **Rp. 283.561.600,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah)** dan yang terealisasi sebesar **Rp. 282.209.400,- (Dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan ribu empat ratus rupiah)** atau dengan capaian realisasi belanja sebesar 99,52% dengan jumlah anggaran yang tersisa sebesar **1.352.200,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah)**. Dalam hal ini Kantor Camat Toma penyerapan anggaran hampir seratus persen. Berikut ini adalah rincian capaian serapan anggaran tahun 2022. (Dapat dilihat pada tabel di bawah ini)

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian 2022			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen tase	Sisa Pagu
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp 217.215.250	Rp 216.596.250	99,72%	Rp. 619.000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.547.950	Rp 2.547.950	100%	Rp. -
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 321.050	Rp 321.050	100%	Rp. -
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 486.100	Rp 486.100	100%	Rp. -
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 503.600	Rp 503.600	100%	Rp. -
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 503.600	Rp 503.600	100%	Rp. -
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 503.600	Rp 503.600	100%	Rp. -
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 230.000	Rp 230.000	100%	Rp. -
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 47.635.000	Rp 47.635.000	100%	Rp. -
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 47.160.000	Rp 47.160.000	100%	Rp. -
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 475.000	Rp 475.000	100%	Rp. -
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 10.450.000	Rp 10.450.000	100%	Rp. -
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 10.450.000	Rp 10.450.000	100%	Rp. -
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 115.072.300	Rp 125.569.600	99,82%	Rp. 619.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 627.500	Rp 627.500	100%	Rp. -
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 41.670.400	Rp 41.498.900	99,59%	Rp. 171.500
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 5.154.400	Rp 4.786.900	92,87%	Rp. 367.500
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 67.620.000	Rp 67.540.000	99,88%	Rp. 80.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 40.050.000	Rp 40.050.000	100%	Rp. -
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 450.000	Rp 450.000	100%	Rp. -
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 39.600.000	Rp 39.600.000	100%	Rp. -
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.460.000	Rp 1.460.000	100%	Rp. -
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 1.460.000	Rp 1.460.000	100%	Rp. -
7.01.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 5.550.000	Rp 5.550.000	100%	Rp. -
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 5.550.000	Rp 5.550.000	100%	Rp. -
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 5.550.000	Rp 5.550.000	100%	Rp. -
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.380.150	Rp 1.380.150	100%	Rp. -
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 1.380.150	Rp 1.380.150	100%	Rp. -
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 1.380.150	Rp 1.380.150	100%	Rp. -

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 33.106.500	Rp 33.106.500	100%	Rp. -
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Rp 33.106.500	Rp 33.106.500	100%	Rp. -
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Rp 33.106.500	Rp 33.106.500	100%	Rp. -
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 26.309.700	Rp 25.576.500	97,21%	Rp. 733.200
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Rp 26.309.700	Rp 25.576.500	97,21%	Rp. 733.200
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 1.514.700	Rp 781.500	0%	Rp. 733.200
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 23.550.000	Rp 23.550.000	0%	Rp. 733.200
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 1.245.000	Rp 1.245.000	99,96%	Rp. 733.200
T O T A L		Rp 283.561.600	Rp 282.209.400	99,52%	Rp. 1.352.000

Secara umum efektifitas anggaran (kegiatan yang ada di DPPA Kantor Camat Toma Tahun Anggaran 2022) terhadap capaian sasaran Kantor Camat Toma, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang tersedia telah digunakan maksimal terhadap capaian kinerja sasaran organisasi

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 merupakan salah satu kewajiban sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam mengelola kewenangan yang diberikan. Ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.

Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya berorientasi pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang tertuang pada pola dasar Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Toma Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2022.

Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam persefektif yang lebih luas maka LAKIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik dan perwujudan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini sebagaimana di maksud dalam Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja instansi didasarkan lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

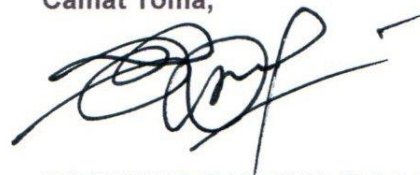
Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 pada umumnya telah dapat dilaksanakan. Program Kerja Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan disusun dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Keberhasilan dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen terkait. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Berdasarkan laporan yang telah kami susun diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang telah direncanakan sebagian besar telah dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran biaya yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Toma Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang, menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan serta menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Toma, Januari 2023

Camat Toma,



ROMIANUS MADUWU, S.Pd.,MM
NIP. 19770115 200801 1 022

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

7. PK Perubahan Tahun 2022
8. PK Tahun 2023
9. IKU Tahun 2021-2026
10. Rencana Aksi Perubahan Tahun 2022
11. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Renstra 2021-2026 /Tabel T-C.26)
12. Tabel Renja Perubahan Tahun 2022

1. Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan (PK-P) Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN KECAMATAN TOMA

Alamat: Jl. Arah Genasi Km. 10 Desa Hilisataro Raya Kode Pos 22865
Email : kantorcamatoma.nisel@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ROMIANUS MADUWU, S. Pd.,MM**
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/III d
NIP. : 19770115 200801 1 022
Jabatan : CAMAT TOMA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH**
Jabatan : Bupati Nias Selatan

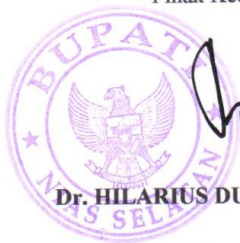
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, Oktober 2022

Pihak Kedua,



Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH

Pihak Pertama,



ROMIANUS MADUWU, S. Pd.,MM
Penata Tingkat I
NIP. 19770115 200801 1 022

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KANTOR CAMAT TOMA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja aparatur	- Nilai Lakip	Baik
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Dok
3.	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat kecamatan	- Persentase pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu	85 %
4.	Meningkatnya kinerja pemerintah desa	- Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi, laporan pertanggungjawaban desa tepat waktu dan berkualitas	75%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 217.215.250	
2.	Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik	Rp 5.550.000	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 1.380.150	
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 33.106.500	
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 26.309.700	
J u m l a h		Rp 283.561.600	

Teluk Dalam, Oktober 2022

Pihak Kedua,



Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH

Pihak Pertama,



ROMIANUS MADUWU, S. Pd.,MM
Penata Tingkat I
NIP. 19770115 200801 1 022

2. Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN KECAMATAN TOMA

Alamat: Jln. Arah Genasi Km. 10 Desa Hilisataro Raya Kode Pos 22865
Email : kantorcamatoma.nisel@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ROMIANUS MADUWU, S. Pd., MM**

Jabatan : CAMAT TOMA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH**


Jabatan : Bupati Nias Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capain kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, Januari 2023

Pihak Kedua,

Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH

Pihak Pertama,


ROMIANUS MADUWU, S. Pd., MM
NIP. 19770115 200801 1 022


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR CAMAT TOMA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja aparatur	- Nilai Lakip	Baik
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Dok
3.	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat kecamatan	- Persentase pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu	85 %
4.	Meningkatnya kinerja pemerintah desa	- Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi, laporan pertanggungjawaban desa tepat waktu dan berkualitas	80%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 298.432.243	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 7.228.800	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 17.764.178	
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 46.012.740	
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 30.562.039	
Jumlah		Rp 400.000.000	

Teluk Dalam, Januari 2023

Pihak Kedua,

Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH

Pihak Pertama,

ROMIANUS MADUWU, S. Pd., MM
 NIP. 19770115 200801 1 022

3. Lampiran IKU Kantor Camat Toma Tahun 2021-2026

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TOMA KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor : 138/06/12.14.12/2022

Tanggal : 6 Januari 2022

Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR CAMAT TOMA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR CAMAT TOMA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai Lakip	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik
2.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
3.	Persentase pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu	80%	85%	86%	87%	89%	90%	87%
4.	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi, laporan pertanggungjawaban desa tepat waktu dan berkualitas	75%	75%	76%	77%	78%	80%	80%

Toma, 6 Januari 2022

CAMAT TOMA,


MARTIANUS ZEBUA, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19820320200502 1 001

4. RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN 2022

RENCANA AKSI PERUBAHAN KANTOR CAMAT TOMA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kegiatan	Rencana Awal	Anggaran (Rp)	Penanggungjawab	Jadwal Kegiatan	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur Kecamatan	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terselesaikan tepat waktu, Nilai Laki yang berkualitas baik	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				217,215,250	Kasubbag Perencanaan & Keuangan	TW I	0%	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,547,950		TW II	0%	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	Menyusun, menyiapkan dokumen reja dan perubahan reja	311,050		TW III	52%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	Menyusun, menyiapkan dokumen RKA	496,100		TW IV	48%	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	Menyusun, menyiapkan dokumen Perubahan DPA	503,600		TW I	0%	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA-SKPD	1 Dok	Menyusun, menyiapkan dokumen DPA	503,600		TW II	0%	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	Menyusun, menyiapkan dokumen Perubahan DPA	503,600		TW III	0%	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	Menyusun, menyiapkan dokumen Perubahan DPA	503,600		TW IV	100%	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	Menyusun, menyiapkan dokumen lakip, LPPD	230,000		TW I	0%	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	Menyusun, menyiapkan dokumen lakip, LPPD	230,000		TW II	0%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	Menyusun, menyiapkan dokumen lakip, LPPD	230,000	TW III	0%				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	Menyusun, menyiapkan dokumen lakip, LPPD	230,000	TW IV	100%				
		Persentase pembayaran gaji/tunjangan PNS dan pelaporan keuangan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						47,835,000	Kasubbag Perencanaan & Keuangan, Bendahara	TW I	25%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Thn	mengurus gaji dan tunjangan ASN	47,160,000	TW II	25%			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	Menyusun, menyiapkan dokumen laporan keuangan (penyusunan LRA, LPE, LO, neraca, SPJ fungsional, CaK) dan Laporan BMD	475,000	TW III	25%			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	Menyusun, menyiapkan dokumen laporan keuangan (penyusunan LRA, LPE, LO, neraca, SPJ fungsional, CaK) dan Laporan BMD	475,000	TW IV	25%			
		Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai, operasional kantor dan pelayanan publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10,450,000	Kasubbag Umum & Kepegawaian	TW I	100%
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16 Stel	Pengadaan pakaian dinas PNS	10,450,000	TW II	0%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah						115,072,300		TW III	0%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Thn	Penyediaan alat-alat dan komponen listrik	627,500	TW IV	0%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Thn	Penyediaan ATK, makanan & minuman rapat kebutuhan kantor	41,670,400	TW I	11.55%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan jasa cetak dan penggandaan	1 Thn	Penyediaan bahan cetak kebutuhan kantor, penggandaan berkas dokumen kantor	5,154,400	TW II	11.16%			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan jasa cetak dan penggandaan	1 Thn	Penyediaan bahan cetak kebutuhan kantor, penggandaan berkas dokumen kantor	5,154,400	TW III	11.16%						
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan jasa cetak dan penggandaan	1 Thn	Penyediaan bahan cetak kebutuhan kantor, penggandaan berkas dokumen kantor	5,154,400	TW IV	66.13%						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar dan Dalam Daerah	1 Thn	Melaksanakan perjalanan dinas di kabupaten dan desa sehubungan dengan kegiatan kantor	67,620,000	TW I	28.19%						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar dan Dalam Daerah	1 Thn	Melaksanakan perjalanan dinas di kabupaten dan desa sehubungan dengan kegiatan kantor	67,620,000	TW II	28.19%						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar dan Dalam Daerah	1 Thn	Melaksanakan perjalanan dinas di kabupaten dan desa sehubungan dengan kegiatan kantor	67,620,000	TW III	21.43%						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar dan Dalam Daerah	1 Thn	Melaksanakan perjalanan dinas di kabupaten dan desa sehubungan dengan kegiatan kantor	67,620,000	TW IV	33.33%						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar dan Dalam Daerah	1 Thn	Melaksanakan perjalanan dinas di kabupaten dan desa sehubungan dengan kegiatan kantor	67,620,000	TW I	32.25%						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar dan Dalam Daerah	1 Thn	Melaksanakan perjalanan dinas di kabupaten dan desa sehubungan dengan kegiatan kantor	67,620,000	TW II	28.62%						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar dan Dalam Daerah	1 Thn	Melaksanakan perjalanan dinas di kabupaten dan desa sehubungan dengan kegiatan kantor	67,620,000	TW III	5.80%						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar dan Dalam Daerah	1 Thn	Melaksanakan perjalanan dinas di kabupaten dan desa sehubungan dengan kegiatan kantor	67,620,000	TW IV	5.80%						

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			49,858,000			
	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa Surat Menyurat	1 Ith	Penyediaan materi dan benda pos lainnya untuk keperluan administrasi	450,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	TW I 25% TW II 25% TW III 25% TW IV 25%
	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tepenuhnya pelayanan kebutuhan administrasi dan operasional kantor	1 Ith	Penyediaan jasa Pegawai Tidak Tetap/tenaga honoror yang membantu pekerjaan/tugas-tugas PHS	39,600,000		TW I 25% TW II 25% TW III 25% TW IV 25%
	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,460,000		
Persentase aset kantor camat yang terinventarisasi dengan baik dan layak fungsi	100%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilakukan	1 Thn	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1,460,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	TW I 0% TW II 50% TW III 0% TW IV 50%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1,380,150		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				1,380,150		
Persentase capaian keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa	100%	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan PKK	1 Desa	Pelaksanaan kegiatan organisasi kelembagaan (PKK, Karang Taruna dll)	1,380,150	Kasi Pelayanan Umum	TW I 54.34% TW II 45.66% TW III 0% TW IV 0%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				33,106,500		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Pengawasan Kepala Daerah				33,106,500		
Persentase kegiatan tahunan yang terlaksana dengan baik	100%	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Terlaksananya Upacara HUT RI	1 Keg	Penyelenggaraan kegiatan, persiapan fasilitas sarana & prasarana HUT KEMRI Pelaksanaan dan upacara bendera	33,106,500	Kasi Kesejahteraan Sosial	TW I 0% TW II 0% TW III 100% TW IV 0%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5,550,000		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5,550,000		
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Persentase usulan musrenbang yang terakomodir	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Dok	Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	5,550,000	Kasi Tata Pemerintahan	TW I 100% TW II 0% TW III 0% TW IV 0%
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			26,309,700		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			26,309,700		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1,514,700		
3	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	Persentase desa yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	Persentase Desa yang memiliki Ranperdes tentang APBDes	2 Dok	Mengawasi perencanaan RAPDes, APBDes, pendampingan manajemen pemdes bagi perangkat desa dan BPD	1,514,700		TW I 51.60% TW II 0% TW III 48.40% TW IV 0%
		Persentase capaian keberhasilan pembangunan dana desa	Jumlah Monitoring dan evaluasi ADD/DD yang dilakukan	3 Dok	Pembekalan pengelolaan keuangan desa, monitoring/evaluasi dana desa	23,550,000	Kasi PMD	TW I 33.62% TW II 33.19% TW III 0% TW IV 33.19%
4	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	Persentase penurunan angka kriminal di masyarakat	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	1 Keg	Pelaksanaan forum komunikasi tingkat kecamatan dan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan/desa	1,245,000	Kasi Trantib	TW I 50.32% TW II 49.68% TW III 0% TW IV 0%
					JUMLAH	283.561.600		

Toma, Oktober 2022
 CAMAT TOMA

 ROMIANUS MADUWU, S.P.,MM
 Penata Tk. I
 NIP. 19770115 200801 1 022

5. Lampiran Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera			
Misi 1 : Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri, transparan dan profesionalisme aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	Penguatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan • Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (<i>reward and punishment</i>) • Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur • Peningkatan disiplin aparatur kantor Camat Toma • Menerapkan nilai budaya dalam pola pelayanan
Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Meningkatnya kinerja pemerintah desa	Pemenuhan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan tepat waktu • Mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa • Meningkatkan pembinaan dan evaluasi penggunaan anggaran desa untuk pembangunan
Misi 2 : Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas			
Terciptanya masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan di kecamatan	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Optimalisasi keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan pemerintah di berbagai aspek • Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pembangunan
Terpeliharanya sarana prasarana, fasilitas umum dan lingkungan hidup	Meningkatnya pemeliharaan kondisi prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan	Efektifitas pembangunan Jalan dan Jembatan serta pengelolaan drainase Efektifitas Pembangunan dan pemeliharaan sarana gedung/kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jalan dan Jembatan menghubungkan seluruh desa • Pengelolaan drainase secara berkelanjutan
Misi 5 : Memberi rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat			
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Masyarakat melaksanakan aktivitasnya secara aman dan tertib	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakkan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku • Mengoptimalkan koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sistem keamanan lingkungan • Penerapan sanksi pelanggaran keamanan dan ketertiban • Pembinaan dan pelatihan SDM personil LINMAS

6. Lampiran Tabel Renja Perubahan Tahun 2022

TABEL T-B.56
RANCANGAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2022

NAMA OPD : KANTOR CAMAT TOMA

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Sumber Dana	Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7 01	KECAMATAN				362.761.600		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				284.715.250		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah			2.547.950		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Toma	2 Dokumen	321.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Toma	1 Dokumen	486.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen	Kantor Camat Toma	1 Dokumen	503.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kantor Camat Toma	1 Dokumen	503.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen	Kantor Camat Toma	1 Dokumen	503.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7 01 01 2.01 06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Toma	4 Laporan	230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				126.835.000		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Toma	15 Orang	126.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Toma	1 Laporan	475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					10.450.000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		16 Paket	10.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					99.697.300		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Toma	1 Paket	627.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Toma	2 Paket	17.965.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor Camat Toma	2 Paket	5.154.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Toma	310 Laporan	75.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					43.725.000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Toma	2 Laporan	450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor Camat Toma	7 Laporan	3.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Toma	12 Laporan	39.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.460.000		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kantor Camat Toma	2 Unit	1.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5.550.000		
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					5.550.000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kantor Camat Toma	1 Laporan	5.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.380.150	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1.380.150	
7	01	03	2.01	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Toma	1 Laporan			1.380.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						33.106.500	
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah						33.106.500	
7	01	05	2.01	06 Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Kantor Camat Toma	2 Lembaga Masyarakat			33.106.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						38.009.700	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						38.009.700	
7	01	06	2.01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Camat Toma	42 Dokumen			1.514.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kantor Camat Toma	98 Dokumen			35.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06	2.01	11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Toma	2 Dokumen			1.245.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
T O T A L										362.761.600	

Toma, Juni 2022

